

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu Populer. Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*. Rajawali Pers. Depok.
- , 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Sastra Press. Malang.
- Laica Marzuki. 2005. *Berjalan-jaln diranah Hukum*. Konstitusi Pers. Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bohari. 2014. *Pengantar Hukum Pajak*, cetakan ke-10. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2006. *Hukum Pajak*, edisi Revisi. C.V. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Sani Imam Santoso. 2014. *Teori Pidana dan Sanderan Badan Gijzeling*. Penaku. Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Rochmat Soemitro. 1987. *Azas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Eresco. Bandung.
- Khoirul Hidayah Mudawamah. 2015. *Gijzeling dalam Hukum Pajak Indonesia (kajian peraturan perundang-undangan dan integrasi islam)*. UIN-Maliki Pers. Malang.
- Djam'an Satori Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.

Jonaedi Efendian Jhony Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.

Irwansyah, dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. edisi Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Muhammad Nofan 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dalam Melakukan Pendaftaran dengan Sistem Elektronik Registration*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Jurnal, dan Artikel.

Imam Wildan Purbo Prakoso. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020) 494-500. *DHARMASISYA Vol. 1 NO. 1 (Maret 2020)*

Muh.Amin Saleh. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Penanggung Pajak dalam Pelaksanaan Penyanderaan (GIJZELING)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular. Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 1, April 2019.

Arnetta Anggrainie Santoso. *Keabsahan Penyanderaan (Gijzeling) Wajib Pajak Beritikad Baik* (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 72329/PP/M.XVIII A/99/2016). Jurnal Hukum Adigama. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Volume 4 Nomor 1, Juni 2021 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan kewajiban Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep218/PJ./2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan PMK No.184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata cara Pembayaran , Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengansuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Skep Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK/.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

peraturan direkur jenderal pajak nomor Per-03/PJ/2018 Tentang perubahan Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 tahun 2003.

Surta Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2020 Tentang Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang Menjadi Kewajiban Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 72329/PP/M.XVIII A/99/2016.